

TERDEPAN DALAM BERITA

SEHARI, POLDA KALTARA LAKUKAN PENANAMAN 350 BIBIT POHON

BACA HALAMAN 2-3



IBRAHIM ALI: PERSOALAN LAHAN PUSPEM SUDAH ADA TITIK TERANG

BACA HALAMAN 8-9



Sehari, Polda Kaltara Lakukan Penanaman 350 Bibit Pohon

TANJUNG SELOR - Masih dalam momentum hari Kemerdekaan ke-78 RI, Polda Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penanaman bibit pohon yang berlangsung di Halaman Mako Polda Kaltara, beberapa waktu lalu.

Penanaman anak pohon itu, dikomando langsung oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia (SDM) Polda Kaltara, Kombes Pol Yusuf Rahmanto, S.I.K., M.H. "Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan

RI ke-78. Kita melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman bibit pohon. Kegiatan ini, merupakan masih rangkaian yang berpuncak pada Rabu akan datang," jelasnya, Minggu (20/8/2023).

Dia melanjutkan, pada 23 Agustus mendatang, Kepolisian Seluruh Indonesia bakal menggelar penanaman pohon yang dilakukan secara serentak. Bahkan hingga pada tingkat satuan bawah, kegiatan penanaman

pohon tersebut diharapkan dapat menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia.

"Kegiatan penanaman pohon atau penghijauan, dilaksanakan secara serentak di seluruh polda, sampai dengan tingkat polres dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-78," terangnya.



Dikatakannya, penanaman pohon merupakan wujud Polri, khususnya Polda Kaltara dalam melestarikan negeri untuk penghijauan sejak dini. Program penghijauan, merupakan bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan dan Polri berkomitmen terhadap pelestarian alam demi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup.

Adapun, dalam sehari Polda Kaltara telah melakukan penanaman pohon

dengan 350 pokok. Adapun, untuk jenis bibit pohon yang ditanam beragam jenis, diantaranya cengkih, pala, mangga, durian dan rambutan.

“Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia,” tuturnya.

Sementara itu, Humas Polresta Bulungan, Bripka Hadi Purnomo membenarkan adanya gelar penanaman pohon secara serentak oleh kepolisian di seluruh Indonesia. “Iya benar,

nanti kita dimana kegiatannya, kami kabari,” ucap Bripka Hadi.

Namun, untuk jumlah bibit pohon yang akan ditanam oleh Polresta Bulungan, kata dia masih akan berkoordinasi dengan jajaran Polsek setempat. “Ntar di pastikan dulu sama yang Polsek,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Gubernur Perkenalkan “Beras Adan” Sebagai Salah Satu Unggulan UMKM Kaltara

TARAKAN – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), terus meraih dukungan luas dari berbagai sektor. Gernas BBI, yang memiliki fokus pada pendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, kini menjadi sorotan dalam upaya memajukan ekonomi domestik.

Gernas BBI memanasifestasikan semangat untuk mendukung produk-produk lokal dan mempromosikan kebanggaan terhadap barang-barang buatan Indonesia.

Dalam acara peluncuran di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, telah mengambil inisiatif dengan menghadirkan salah satu produk unggulan daerahnya. ‘Beras Adan’, sebagai contoh nyata keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengambil bagian dalam Gernas BBI.

Dalam sebuah wawancara live dengan media elektronik, Gubernur Zainal memaparkan tentang potensi luar biasa UMKM di Kaltara yang sejalan dengan semangat Gernas BBI. Tema utama Gernas BBI, “Menyatu dalam Harmoni Benuanta” terlihat tercermin dalam berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Kaltara.

Salah satu produk unggulan yang mendapat sorotan adalah ‘Beras Adan’. “Beras ini diproduksi di perbukitan daerah Krayan, dan berhasil meraih pasar internasional. Bahkan, Kesultanan Brunei Darussalam diwakili oleh Sultan Hasanah Bolkia telah menjadi konsumen setia beras adan,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmennya dalam mendukung UMKM Kaltara. Ia yang merupakan seorang Purnawirawan Polri ini mengakui tantangan yang dihadapi UMKM dalam beradaptasi dengan era digital, terutama di wilayah yang masih memiliki kendala akses. Meskipun demikian, ia melihat Gernas BBI sebagai peluang emas untuk mendukung peralihan ini.

“Dengan Gernas BBI tahun 2023 ini

kita bersyukur, karena bisa meningkatkan rasa bangga kami dengan buatan Indonesia melalui program produk-produk dalam negeri yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo),” ujarnya.

Zainal juga memuji kontribusi UMKM Kaltara dalam ekosistem digital. “Pelaksanaan UMKM ini sangat membantu dan mendorong khususnya UMKM di Kaltara untuk bisa masuk ke sistem digital. Sistem digital baik dalam E-Commerce, seperti jual beli online, maupun dalam sistem E-Catalogue, telah diadopsi oleh sejumlah pelaku UMKM di berbagai lokasi,” jelasnya.

Dengan semangat Gernas BBI yang terus bergerak maju, harapan akan

peningkatan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia semakin menguat. Produk-produk unggulan seperti Beras Adan dari Kaltara menjadi bukti nyata potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki Indonesia.

Tak hanya itu, dalam mengatasi kendala akses di beberapa wilayah, Gubernur berharap bantuan dari Kominfo. “Kita harapkan bantuan dari Pak Dirjen Kominfo supaya wilayah yang masih blank spot yang sudah ada BTS-nya di Kaltara bisa dibantu untuk pemasangannya. Sehingga semua UMKM di Kaltara bisa masuk dalam sistem,” tutup Gubernur. (dkisp)





Melalui KIF 2023, Pemprov Yakinkan Investor Masuk ke Kaltara

TARAKAN - Dalam rangka meningkatkan minat investasi di Bumi Benuanta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara menyelenggarakan Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.

Masuk dalam gelaran Festival Karya Kreatif Benuanta (FKKB) 2023, KIF 2023 merupakan wadah pertemuan nasional maupun internasional serta melibatkan pelaku usaha lokal atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

KIF 2023 mengangkat tema Investment : Basic Infrastructures, Food Security, Downstream Industry, Tourism, Energy & Green Industrial Park "North Kalimantan is The Future of Indonesia" dan berlangsung di Ruang Pertemuan Pangkalan TNI AU Anang Busra Kota Tarakan, Sabtu (19/8).

"Selayaknya sebuah etalase, maka Provinsi Kaltara merupakan salah satu etalase Indonesia yang dita-

mpilkan dijalur pelayaran tengah bagian utara tepatnya berada dijalur ALKI II," buka Asisten bidang Perencanaan dan Pembangunan Setprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara.

Oleh karena itu, Provinsi Kaltara layak menjadi tujuan investasi didasarkan karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sering dilewati oleh kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran tradisional.

"Kaltara juga merupakan kawasan yang kondusif untuk berinvestasi, dimana Provinsi Kaltara dengan tingkat kejahatan yang rendah di Indonesia serta memiliki infrastruktur pendukung yang memadai," tambahnya.

Tak hanya lokasinya yang strategis, Provinsi Kaltara memiliki potensi yang sangat besar seperti di sektor perikanan dan kelautan yang juga menjadi komoditi unggulan dengan nilai ekonomi tinggi.

"Potensi lainnya ialah industri pariwisata yang ramah lingkungan. Industri pariwisata saat ini menjadi

salah satu pendorong perekonomian yang pengembangannya ke penataan Desa Wisata serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal," imbuhnya.

Mengingat letak geografis Kaltara yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltara telah menjalankan program pengembangan lumbung pangan atau food estate dan pengembangan energi bahan terbarukan di Kabupaten Bulungan guna menopang kebutuhan IKN Nusantara nantinya.

Bustan menuturkan atas dasar banyaknya potensi yang dimiliki Kaltara, maka sudah selayaknya kegiatan KIF 2023 dilaksanakan sebagai wadah pertemuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi di Provinsi ke 34 ini.

"Tentunya dengan tujuan menarik investor baik nasional maupun internasional untuk berinvestasi di Kaltara dengan melibatkan pelaku UMKM lokal dan perusahaan-perusahaan daerah di Kaltara," tutupnya. (dkisp)



ABADIKAN MOMEN : Para narasumber Forum Digitaltalk berfoto bersama di Hotel Tarakan Plaza, Sabtu (19/8).

Sertifikat Halal Untuk Tingkatkan Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk

TARAKAN – Pemerintah semakin mengintensifkan langkah-langkahnya dalam memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk bagi masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi dan penggunaan. Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah mewajibkan sertifikat halal pada produk-produk, terutama yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan target mendorong 30 juta pelaku UMKM untuk bertransformasi ke dalam ekosistem digital, pemerintah mendorong UMKM untuk memproduksi produk berkualitas dan kompetitif. Salah satu cara yang diperkenalkan adalah dengan menyertakan sertifikat halal pada produknya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Menyadari signifikansi sertifikat halal ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggelar Forum Digitaltalk dengan tema

“Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” pada Sabtu (19/8).

Sebagai pembicara utama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana, menyoroti pentingnya sertifikasi halal mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta orang (Laporan RISCC 2023).

“UMKM harus menjadi pelaku terdepan dalam mengambil peluang dari industri pariwisata halal, yang merupakan pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan wisatawan muslim global terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja mereka,” kata Wijaya.

Terkait hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pada tanggal 17 Oktober 2024 akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk 3 jenis produk, termasuk makanan dan minuman, bahan

baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Forum ini melibatkan para pelaku UMKM dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriani, serta pejabat dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan, acara tersebut juga menandai pemberian sertifikat halal kepada 30 UMKM yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk memasuki era digital dan meningkatkan daya saing produk melalui kualitas dan keamanan yang dijamin oleh sertifikat halal. (dkisp)



ISTIMEWA

RESMI DILANTIK: Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kaltara umumnya memiliki pengalaman menjadi penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Kaltara Resmi Dilantik, Ketua Bawaslu Harap Segera Adakan Pleno

TANJUNG SELOR - Bawaslu RI, secara resmi melantik Komisioner Bawaslu se-Indonesia termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdiri dari empat Kabupaten dan Satu Kota.

Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akif memberikan selamat, terhadap pimpinan Kabupaten yang telah terpilih. "Saya menyampaikan selamat karena telah dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas," harap Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akif kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).

Adapun, pimpinan yang masih sisa petahana dari masing-masing Kabupaten dan Kota hanya ada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Sementara, untuk Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Tarakan rata-rata pimpinan baru. Mengenai kurangnya komposisi petahana di setiap Kabupaten Kota di Kaltara, Kata Rustam itu merupakan dinamika dan sepenuhnya keputusan Bawaslu RI.

"Tetapi, umumnya memiliki pengalaman di penyelenggara pemilu. Seperti, anggota Panwascam, Staf Bawaslu, bahkan ada dari PPK. Jadi kami tidak terlalu khawatir soal itu," ujarnya.

Dilantiknya komisioner Bawaslu Kabupaten dan Kota dipastikan langsung bertepatan dengan pengawasan usai ditetapkan DCS oleh KPU. Serta ada tahapan panjang nantinya hingga pada pemungutan suara, soal bekal pengetahuan yang berkaitan

dengan sengketa proses pemilu, kata Rustam Bawaslu RI telah melakukan pemberian materi berkaitan dengan orientasi kerja.

"Itu materi sifatnya pengantar dan diberikan secara umum. Sebelum masuk tahapan. Nantinya ada pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kaltara sesuai dengan divisi pengampu masing-masing. Kita agendakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Dan perihal itu, telah diprogramkan masing-masing divisi di Bawaslu Kaltara. Usai resmi dilantik, pleno tingkat pimpinan Kabupaten dan Kota se-Kaltara belum dilaksanakan sampai hari ini. Rustam berharap, pleno tersebut dapat segera dilakukan mengingat Bawaslu Kaltara akan menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu RI. "Kalau pleno pemilihan ketua itu diinternal mereka, kita berharap itu segera dilaksanakan mengingat Bawaslu Provinsi akan menyampaikan laporan itu ke Bawaslu

RI," pungkasnya.

Berdasarkan pengumuman resmi oleh Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023, dalam mengamatkan UU Nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum, setelah melakukan penilaian terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan bersama ini diumumkan calon anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota terpilih masa jabatan 2023-2028.

Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan diantaranya. Dwi Suprpto, Riswan dan Sri Wahyuni. Kabupaten Malinau, Donny, Rudiyanto, Ryan Virgiawan, Suriansyah dan Toni Wardani. Kabupaten Nunukan, Hariadi, Mochamad Yusran, dan Tusriadi. Kabupaten Tana Tidung, Augusto Ardi Ruswandi, Ardiansyah dan Dika Ramdhani, Kota Tarakan A, Muh Saifullah, Jhonson dan Riswanto. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika





MARTINUS/MKR

KANTOR DPRD KTT: berdiri kokoh diatas lahan Konsensi PT Inhutani. Kini telah mendapatkan solusi, berupa pengurangan harga sewa lahan oleh Pemda kepada perusahaan.

Ibrahim Ali: Persoalan Lahan Puspem Sudah Ada Titik Terang

TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, hingga memasuki usianya ke-16 tahun, terus berbenah menata daerah ditengah persoalan mendasar yang dialami.

Pasalnya, dari keseluruhan wilayah KTT, hampir sekitar 60 persen lahan yang ada saat ini dikuasai oleh perusahaan. Sisanya merupakan milik masyarakat dan pemerintah daerah.

Beberapa perusahaan yang beroperasi di KTT, hampir bergerak pada semua sektor industri, seperti perkebunan sawit, perusahaan kayu, min-

yak, gas serta sektor potensial lainnya.

Mengenai beberapa bangunan pemerintah daerah yang telah berdiri kokoh diatas lahan konsensi milik PT Inhutani, hingga hari ini pemerintah daerah telah mendapatkan solusi kongkrit.

Bupati KTT, Ibrahim Ali mengatakan, pemerintah tidak menyulutkan semangat sedikitpun atas persoalan itu. Dia bersama masyarakat dan stakeholder terkait terus berupaya, supaya status pemilikan lahan terse-

but kembali sepenuhnya menjadi milik Negara untuk kepentingan masyarakat KTT.

Adapun beberapa bangunan yang telah berdiri diatas lahan milik PT Inhutani, antara lain, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Joesoef Abdulah, Pasar Imbayuk Taka, Kantor KPU dan BPBD, RSUD dr Akhmad Berahim, Pendopo Djafarudin, Kantor DPRD, termasuk bangunan sekolah SMAN Terpadu Unggulan Satu, serta pemukiman masyarakat yang berderetan dengan pasar Imbayuk Taka.



“Kalau berbicara itu, Alhamdulillah dengan membangun komunikasi yang baik, lahan PT Inhutani kita sudah mendapatkan titik terang,” ujarnya, Minggu (20/8/2023).

Dirinya menambahkan, pada tahun 2022 dirinya bersama pejabat terkait dari KTT, termasuk tokoh masyarakat telah difasilitasi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Tohir, melalui Sekretaris Menteri. Dalam pertemuan di Jakarta, turut diundang Komisaris PT Inhutani, yang dihadiri oleh Direktornya, Bapak Oman.

“Kami menyampaikan, titik permasalahan pemkab Tana Tidung saat ini, telah membangun beberapa in-

frastruktur diatas lahan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Inhutani dengan luas 56 hektare (ha), perjanjiannya dengan sistem sewa. Itu telah dijalankan beberapa tahun lalu sejak KTT dimekarkan menjadi Kabupaten sendiri,” katanya.

Belakangan, pemerintah daerah merasa kesulitan membayar sewa lahan tersebut dengan postur APBD yang tergolong turun bebas dibandingkan tahun sebelumnya. Kata Ibrahim, persoalan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) baginya selaku kepala daerah.

“Selama ini saya telah membuat terobosan dengan membangun komunikasi dengan Menteri BUMN.

Alhamdulillah, difasilitasi sehingga mendapatkan titik terang, yang dari awalnya tawaran PT Inhutani kepada pemerintah daerah sekitar Rp 56 miliar, akhirnya kita minta pembayaran sewa itu turun menjadi Rp 10 miliar, yang berlaku pada tahun 2024 akan datang,” jelasnya dengan antusias.

“InsyaAllah, itu akan menjadi tambahan aset pemerintah daerah, selain aset yang ada saat ini dengan jumlah 4,42 hektare di Pusat Pemerintahan (Puspem),” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika





Paksa Mantan Pacar Berhubungan, Paman Korban Laporkan Pelaku ke Polsek Gunung Tabur

TANJUNG REDEB - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Gunung Tabur mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak, pada Sabtu (19/8/2023).

Kapolsek Gunung Tabur AKP Amin Maulani, mengatakan, berdasarkan laporan, korban mengaku kejadian terakhir kali terjadi pada hari Kamis, 17 Agustus lalu sekitar pukul 21.00 Wita. Tempat kejadian terakhir berlokasi di sekitaran Kecamatan Gunung Tabur.

“Pelaku berinisial AD, usia 22 tahun, diduga melakukan tindakan pencabulan atau persetubuhan terhadap korban. Korban adalah seorang pelajar berusia 17 tahun. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh paman kor-

ban pada tanggal 19 Agustus 2023,” ungkap Kapolsek Gunung Tabur AKP Amin Maulani.

Unit Reskrim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus ini, termasuk barang-barang yang diduga digunakan oleh pelaku dan korban pada saat kejadian.

Dalam laporan tersebut, pelapor, mengungkapkan kronologis peristiwa yang terjadi. Pada awalnya, pelapor dan korban mengenal pelaku dan memiliki hubungan berpacaran. Namun, hubungan tersebut akhirnya putus, namun masih berlanjut dalam komunikasi.

Pada Maret 2022, pelaku diduga memaksa korban untuk melakukan tindakan persetubuhan di rumah

nenek pelaku. Peristiwa serupa dilaporkan terjadi hingga bulan Juli 2023. Pada tanggal 17 Agustus 2023, korban diduga di bawa pelaku ke sebuah tempat di Kecamatan Gunung Tabur, tempat tindakan persetubuhan kembali terjadi. Pada tanggal 19 Agustus 2023, korban dan pelaku terlibat dalam peristiwa serupa, namun ditemukan oleh paman korban.

Pelaku saat ini telah diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Gunung Tabur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, pihak berwajib akan mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran serta memberikan keadilan bagi korban. (hms pol/dez)



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



SEPTEMBER 2023, HOTEL HINGGA STASIUN DIBANGUN DI IKN

BACA HALAMAN 2-3



**KPU SIAP REVISI ATURAN KAMPANYE
DI FASILITAS PEMERINTAH DAN
PENDIDIKAN PASCA PUTUSAN MK**

BACA HALAMAN 31



Komitmen Investor di IKN: Hotel, Stasiun hingga Telekomunikasi Dibangun September 2023

SEMARANG - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa investor telah merencanakan untuk memulai pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2023. Infrastruktur tersebut meliputi hotel, stasiun, kafe, taman, tempat pertemuan, fasilitas olahraga, dan jaringan telekomunikasi.

“Saya kan janji ke kalian bulan September, mereka sudah akan membangun groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olahraga, kafe, untuk anak-anak muda, stasiun untuk transportasi, telekomunikasi,” ungkap Bahlil setelah menghadiri ASEAN Investment Area (AIA) Council Meet-

ing Ke-26 yang merupakan bagian dari Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) Ke-55 di Semarang, Jawa Tengah.

Meskipun Bahlil enggan menyebutkan nilai investasi yang masuk ke IKN, ia memastikan beberapa perusahaan swasta telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum di IKN.



Bahlil juga menegaskan bahwa Upacara Peringatan HUT RI pada 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Bahlil menambahkan, "Apalagi kemarin Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid sudah melakukan upacara di IKN. Jadi jangan kalian pikir investasi itu hanya asing. Ketum Kadin yang punya anggota puluhan ribu sudah upacara di IKN."

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada syarat khusus yang diminta kepada investor swasta untuk membangun di IKN. "Andaikan ada yang meminta sweetener, ini masih dalam kerangka aturan. Tidak mungkin pemerintah beri sweetener yang tidak dalam kerangka aturan. Tidak ada perlakuan khusus, yang ada semua sama," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, bahwa progres pembangunan IKN masih sesuai dengan rencana. "Tentang progres, masih on the right track, setelah ini nanti ada juga investor swasta yang akan memulai

membangun kota nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, namun juga dicintai," ujar Bambang.

Bambang juga menginformasikan bahwa upacara peringatan HUT Ke-78 RI pada 2023 telah dilaksanakan di IKN, Kalimantan Timur, dengan peserta yang terdiri dari pekerja di

IKN, aparat TNI dan Polri, masyarakat adat, serta diaspora dari beberapa negara. "Para pekerja akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang akan kita raih utamanya pada tahun 2024, di mana Bapak Presiden akan memimpin upacara di lokasi IKN ini," pungkasnya. (ant/MK)





PRIVATE SALE ANGGOTA



Dapatkan diskon 25% pada liburan Anda berikutnya di Asia Pasifik. Anggota Accor Plus menikmati diskon tambahan 10%. Pesan sebelum 21 Agustus untuk menginap hingga 30 November 2023.

*Menginap minimal 2 malam. Syarat & ketentuan berlaku.





Gubernur Perkenalkan “Beras Adan” Sebagai Salah Satu Unggulan UMKM Kaltara

TARAKAN – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), terus meraih dukungan luas dari berbagai sektor. Gernas BBI, yang memiliki fokus pada pendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, kini menjadi sorotan dalam upaya memajukan ekonomi domestik.

Gernas BBI memanasifestasikan semangat untuk mendukung produk-produk lokal dan mempromosikan kebanggaan terhadap barang-barang buatan Indonesia.

Dalam acara peluncuran di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, telah mengambil inisiatif dengan menghadirkan salah satu produk unggulan daerahnya. ‘Beras Adan’, sebagai contoh nyata keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengambil bagian dalam Gernas BBI.

Dalam sebuah wawancara live dengan media elektronik, Gubernur Zainal memaparkan tentang potensi luar biasa UMKM di Kaltara yang sejalan dengan semangat Gernas BBI. Tema utama Gernas BBI, “Menyatu dalam Harmoni Benuanta” terlihat tercermin dalam berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Kaltara.

Salah satu produk unggulan yang mendapat sorotan adalah ‘Beras Adan’. “Beras ini diproduksi di perbukitan daerah Krayan, dan berhasil meraih pasar internasional. Bahkan, Kesultanan Brunei Darussalam diwakili oleh Sultan Hasanah Bolkihah telah menjadi konsumen setia beras adan,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmennya dalam mendukung UMKM Kaltara. Ia yang merupakan seorang Purnawirawan Polri ini mengakui tantangan yang dihadapi UMKM dalam beradaptasi dengan era digital, terutama di wilayah yang masih memiliki kendala akses. Meskipun demikian, ia melihat Gernas BBI sebagai peluang emas untuk mendukung peralihan ini.

“Dengan Gernas BBI tahun 2023 ini kita bersyukur, karena bisa meningkatkan rasa bangga kami dengan buatan Indonesia melalui program produk-produk dalam negeri yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo),” ujarnya.

Zainal juga memuji kontribusi UMKM Kaltara dalam ekosistem digital. “Pelaksanaan UMKM ini sangat membantu dan mendorong khususnya UMKM di Kaltara untuk bisa masuk ke sistem digital. Sistem digital baik dalam E-Commerce, seperti jual beli online, maupun dalam sistem E-Catalogue, telah diadopsi oleh sejumlah pelaku UMKM di berbagai lokasi,” jelasnya.

Dengan semangat Gernas BBI yang terus bergerak

maju, harapan akan peningkatan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia semakin menguat. Produk-produk unggulan seperti Beras Adan dari Kaltara menjadi bukti nyata potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki Indonesia.

Tak hanya itu, dalam mengatasi kendala akses di beberapa wilayah, Gubernur berharap bantuan dari Kominfo. “Kita harapkan bantuan dari Pak Dirjen Kominfo supaya wilayah yang masih blank spot yang sudah ada BTS-nya di Kaltara bisa dibantu untuk pemasangannya. Sehingga semua UMKM di Kaltara bisa masuk dalam sistem,” tutup Gubernur. (dkisp)





Melalui KIF 2023, Pemprov Yakinkan Investor Masuk ke Kaltara

TARAKAN - Dalam rangka meningkatkan minat investasi di Bumi Benuanta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara menyelenggarakan Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.

Masuk dalam gelaran Festival Karya Kreatif Benuanta (FKKB) 2023, KIF 2023 merupakan wadah pertemuan nasional maupun internasional serta melibatkan pelaku usaha lokal atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

KIF 2023 mengangkat tema Investment : Basic Infrastructures, Food Security, Downstream Industry, Tourism, Energy & Green Industrial Park "North Kalimantan is The Future of Indonesia" dan berlangsung di Ruang Pertemuan Pangkalan TNI AU Anang Busra Kota Tarakan, Sabtu (19/8).

"Selayaknya sebuah etalase, maka Provinsi Kaltara merupakan salah satu etalase Indonesia yang ditampilkan

kan dijalur pelayaran tengah bagian utara tepatnya berada dijalur ALKI II," buka Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara.

Oleh karena itu, Provinsi Kaltara layak menjadi tujuan investasi didasarkan karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sering dilewati oleh kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran tradisional.

"Kaltara juga merupakan kawasan yang kondusif untuk berinvestasi, dimana Provinsi Kaltara dengan tingkat kejahatan yang rendah di Indonesia serta memiliki infrastruktur pendukung yang memadai," tambahnya.

Tak hanya lokasinya yang strategis, Provinsi Kaltara memiliki potensi yang sangat besar seperti di sektor perikanan dan kelautan yang juga menjadi komoditi unggulan dengan nilai ekonomi tinggi.

"Potensi lainnya ialah industri pariwisata yang ramah lingkungan. Industri pariwisata saat ini menjadi

salah satu pendorong perekonomian yang pengembangannya ke penataan Desa Wisata serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal," imbuhnya.

Mengingat letak geografis Kaltara yang berdampingan atau berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltara telah menjalankan program pengembangan lumbung pangan atau food estate dan pengembangan energi bahan terbarukan di Kabupaten Bulungan guna menopang kebutuhan IKN Nusantara nantinya.

Bustan menuturkan atas dasar banyaknya potensi yang dimiliki Kaltara, maka sudah selayaknya kegiatan KIF 2023 dilaksanakan sebagai wadah pertemuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi di Provinsi ke 34 ini.

"Tentunya dengan tujuan menarik investor baik nasional maupun internasional untuk berinvestasi di Kaltara dengan melibatkan pelaku UMKM lokal dan perusahaan-perusahaan daerah di Kaltara," tutupnya. (dkisp)



ABADIKAN MOMEN : Para narasumber Forum Digitaltalk berfoto bersama di Hotel Tarakan Plaza, Sabtu (19/8).

Sertifikat Halal Untuk Tingkatkan Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk

TARAKAN – Pemerintah semakin mengintensifkan langkah-langkahnya dalam memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk bagi masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi dan penggunaan. Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah mewajibkan sertifikat halal pada produk-produk, terutama yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan target mendorong 30 juta pelaku UMKM untuk bertransformasi ke dalam ekosistem digital, pemerintah mendorong UMKM untuk memproduksi produk berkualitas dan kompetitif. Salah satu cara yang diperkenalkan adalah dengan menyertakan sertifikat halal pada produknya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Menyadari signifikansi sertifikat halal ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggelar Forum

Digitalk dengan tema “Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” pada Sabtu (19/8).

Sebagai pembicara utama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana, menyoroti pentingnya sertifikasi halal mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta orang (Laporan RISCC 2023).

“UMKM harus menjadi pelaku terdepan dalam mengambil peluang dari industri pariwisata halal, yang merupakan pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan wisatawan muslim global terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja mereka,” kata Wijaya.

Terkait hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pada tanggal 17 Oktober 2024 akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk 3 jenis produk, termasuk makanan dan minuman, bahan

baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Forum ini melibatkan para pelaku UMKM dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriani, serta pejabat dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan, acara tersebut juga menandai pemberian sertifikat halal kepada 30 UMKM yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk memasuki era digital dan meningkatkan daya saing produk melalui kualitas dan keamanan yang dijamin oleh sertifikat halal. **(dkisp)**



Koran DIGITAL
MEDIA
KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim

Grand Kartika HOTEL

Paket MAKSIMAL Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2 Rp **90rb** nett /pax

Paket Ber3 Rp **130rb** nett /pax

FREE Ice Tea

Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE 1 pax comp. Light Meal

www.hotelgrandkartika.com



Pekerjaan lanjutan peningkatan kawasan Jalan Diponegoro dan sekitarnya.

Proyek Lanjutan Peningkatan Drainase Kawasan Jalan Diponegoro Capai Rp 28,9 M

TANJUNG REDEB - Lanjutan peningkatan drainase kawasan Jalan Diponegoro dan sekitarnya yang memakan anggaran sebanyak Rp 28,9 miliar. Proyek yang ditarget rampung pada akhir November 2023 mendatang, namun progresnya hingga saat ini belum mencapai 50 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Kawasan Drainase Jalan Diponegoro DPUPR Berau, Muhammad Syahdan Shah menuturkan, peningkatan drainase tersebut dilakukan untuk mengatasi genangan air yang terjadi di beberapa titik di Kecamatan Tanjung Redeb. Seperti di Gang Karomah Jalan Haji Isa III yang sempat tergenang air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Adapun panjang penanganan di Jalan Diponegoro tersebut yakni 980 meter. Mulai dari simpang tiga Jalan Diponegoro-Jalan Gunung Panjang hingga Jalan Karang Mulyo. Dikerjakan selama 189 hari atau 6 bulan, sejak 31 Mei 2023 lalu.

"Excavator juga sudah diturunkan semua di tiga titik yang menjadi fokus kami. Yakni Jalan Haji Isa,

Murjani dan ujung Karang Mulyo. Di Karang Mulyo sepanjang 300 meter, dengan ukuran 3,5 meter x 2,5 meter," terangnya Minggu (20/8/2023).

Kegiatan ini sendiri nantinya akan memaksimalkan jaringan pembuangan air atau drainase primer yang terletak disepanjang Jalan Diponegoro hingga Karang Mulyo. Sedangkan saluran pembuangan yang berada di Jalan Haji Isa III dan Jalan Murjani II merupakan saluran pembuangan sekunder.

"Pembangunan ini untuk menangani genangan sebagaimana diketahui, misalnya di Gang Karomah itu selalu tergenang jika waktu-waktu tertentu selama dua tahun terakhir," jelasnya.

Sehingga, ketika titik-titik genangan yang disebabkan debit air yang tinggi bisa mengalir melalui saluran primer dan tidak tergenang. Dari pembuangan sekunder di Haji Isa 3 dibuang ke pembuangan primer di Diponegoro. Pihaknya akan memperbesar dimensinya sehingga bisa menampung tumpahan tersebut.

Pekerjaan ini di tiga titik berdekatan pada satu proyek, yang nantinya

selain memperbesar dimensi drainase juga akan ditutup untuk penataan wilayah juga.

"Fokus utama gorong-gorong karena dimensi yang ada saat ini dinilai kecil untuk meneruskan air," ujarnya.

Hal ini juga kata Syahdan dikatakan sesuai dengan masterplan saat ini. Apalagi, sebagian wilayah di lokasi masih belum dilakukan pembangunan. Sehingga wilayah resapan masih besar, namun ketika pembangunan telah masif maka wilayah resapan akan semakin berkurang.

"Apalagi itu wilayah perkotaan sudah pasti nanti akan ada pembangunan artinya debit akan semakin tinggi. Nantinya sistem drainase tertutup juga, sekaligus penataan kawasan jalan," jelasnya.

Pembuangan sendiri terbagi dua ke Jalan Diponegoro dan Jalan Teuku Umar. Nantinya diharapkan larinya pembuangan akan ke Jalan Diponegoro untuk sebagian besar. Sebab di Jalan Teuku Umar sudah padat. (mnz)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Nicha Ratnasari



Jajaran Forkopimda Berau berfoto bersama Alutsista pertahanan dan keamanan, di Lapangan Pemuda Tanjung Redeb.

Kenalkan Persenjataan pada Masyarakat Lewat Festival Alutsista

TANJUNG REDEB - Pameran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI maupun Polri digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-78 tahun Kemerdekaan RI, di Lapangan Pemuda Tanjung Redeb selama dua hari, sejak 19-20 Agustus 2023.

Jajaran Kodim 09/02 Berau menggandeng Polres Berau untuk sukseskan festival tersebut. Ada enam stan yang memamerkan Alutsista, mulai dari milik Kodim 09/02 Berau itu sendiri, Polres Berau, Batalyon Armed 18/komposit, Skadron 13/serbu, Polisi Militer dan Brimob.

Bupati Berau Sri Juniarsih meminta, kepada segenap aparat TNI dan Polri di Kabupaten Berau agar terus bersemangat dalam menjaga keutuhan NKRI sembari mengayomi dan melindungi masyarakat. Diakuinya bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang disegani di dunia karena kekuatan prajurit dan alutsistanya.

"Festival ini merupakan wahana edukasi bagi masyarakat untuk dapat melihat langsung beragam je-

nis alutsista yang dimiliki TNI-Polri di Kabupaten Berau," katanya.

Ia berharap akan tumbuh jiwa-jiwa patriotik dalam diri masyarakat untuk semakin mencintai negeri ini. Kemudian, akan tumbuh rasa nasionalisme yang menghasilkan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik pada pembangunan daerah. TNI/Polri bukanlah musuh atau pihak yang harus ditakuti masyarakat, melainkan pengayom dan mitra bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Kita pun patut bersyukur, bahwasanya Kabupaten Berau adalah wilayah yang kondusif. Semua potensi konflik, Alhamdulillah mampu dicegah dan ditanggulangi dengan baik," ungkapnya.

Secara khusus, Sri memberikan apresiasi kepada Komandan Kodim 0902 Berau, Kepala Kepolisian Resor Berau, Skadron 13/Serbu, Komandan Batalyon Armed 18/Buritkang, Komandan Kompi Brimob Berau, dan Komandan Sub Detasemen Polisi

Militer VI 1-2/Berau beserta segenap prajurit yang selama ini telah bekerja keras menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan daerah di Bumi Batiwakkal tercinta.

Sementara, Komandan Kodim 0902 Berau, Letnal Kolonel INF Dony Fatra menyampaikan, masih dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 tahun Kemerdekaan RI, festival Alutsista pertahanan keamanan digelar di Berau. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dengan adanya Alutsista pertahanan keamanan merupakan salah satu yang dapat menciptakan situasi yang kondusif.

"Harapannya masyarakat dapat lebih mengenal dan lebih dekat baik dengan TNI maupun Polri," ucapnya.

"Seperti yang disampaikan Bupati Berau, bahwa kami siap mencari solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat Berau ini," tandasnya. (mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



Paksa Mantan Pacar Berhubungan, Paman Korban Laporkan Pelaku ke Polsek Gunung Tabur

TANJUNG REDEB - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Gunung Tabur mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencabulan atau persetubuhan terhadap anak, pada Sabtu (19/8/2023).

Kapolsek Gunung Tabur AKP Amin Maulani, mengatakan, berdasarkan laporan, korban mengaku kejadian terakhir kali terjadi pada hari Kamis, 17 Agustus lalu sekitar pukul 21.00 Wita. Tempat kejadian terakhir berlokasi di sekitaran Kecamatan Gunung Tabur.

"Pelaku berinisial AD, usia 22 tahun, diduga melakukan tindakan pencabulan atau persetubuhan terhadap korban. Korban adalah seorang pelajar berusia 17 tahun. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh paman kor-

ban pada tanggal 19 Agustus 2023," ungkap Kapolsek Gunung Tabur AKP Amin Maulani.

Unit Reskrim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus ini, termasuk barang-barang yang diduga digunakan oleh pelaku dan korban pada saat kejadian.

Dalam laporan tersebut, pelapor, mengungkapkan kronologis peristiwa yang terjadi. Pada awalnya, pelapor dan korban mengenal pelaku dan memiliki hubungan berpacaran. Namun, hubungan tersebut akhirnya putus, namun masih berlanjut dalam komunikasi.

Pada Maret 2022, pelaku diduga memaksa korban untuk melakukan tindakan persetubuhan di rumah nenek pelaku. Peristiwa serupa di-

laporkan terjadi hingga bulan Juli 2023. Pada tanggal 17 Agustus 2023, korban diduga di bawa pelaku ke sebuah tempat di Kecamatan Gunung Tabur, tempat tindakan persetubuhan kembali terjadi. Pada tanggal 19 Agustus 2023, korban dan pelaku terlibat dalam peristiwa serupa, namun ditemukan oleh paman korban.

Pelaku saat ini telah diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Gunung Tabur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, pihak berwajib akan mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran serta memberikan keadilan bagi korban. (hms pol/dez)



Tim Gateball DWP DPUPR & Pera Kaltim Sabet Juara 1 Turnamen Gateball Merdeka 78

BALIKPAPAN - Tim Gateball Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR & Pera) Kaltim berhasil menyabet gelar juara 1 dalam Turnamen Gateball Merdeka 78 yang digelar pada 18-19 Agustus 2023.

Turnamen ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia oleh UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PIPU) Wilayah 1 DPUPR dan Pera Kaltim, yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Balikpapan.

Dalam turnamen yang berlangsung di halaman kantor tersebut, tim gateball dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim berhasil menduduki posisi kedua, diikuti oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV di posisi ketiga. Sementara itu, Sekretariat DPUPR & Pera Kaltim menempati posisi keempat.

Selain perebutan posisi juara, ada pula penghargaan lain yang diberikan. Arsyad berhasil meraih pencetak top score putra, sementara Tutik Fauziah Rahman menjadi top score putri. Bidang Perkim DPUPR & Pera Kaltim memenangkan predikat kostum terbaik.

Sedangkan untuk yel-yel terbaik, juara pertama diraih oleh Bidang Bina Marga DPUPR & Pera Kaltim, diikuti oleh UPTD PIPU Wilayah 3 dan UPTD PIPU Wilayah 1 di posisi kedua dan ketiga.

Kepala DPUPR dan Pera Kaltim, Aji Muhammad Firta Firnanda, dalam sambutannya mengatakan bahwa turnamen ini merupakan bentuk perayaan HUT Kemerdekaan RI sekaligus ajang silaturahmi. "Di tengah kesibukan yang sangat padat, bersyukur kita semua bisa berkumpul melalui kegiatan turnamen ini," ujarnya.

Deny Wardhana, Kepala UPTD PIPU Wilayah 1 sekaligus ketua panitia, menyampaikan bahwa turnamen ini bertu-

juan untuk memasyarakatkan olahraga gateball di Kaltim dan mencari bibit baru. Turnamen ini diikuti oleh 17 tim, tidak hanya dari internal lingkungan Pekerjaan Umum, tetapi juga dari klub-klub di Samarinda dan Balikpapan.

Marliana Firnanda, Ketua Tim Gateball DWP DPUPR dan Pera Kaltim, mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan timnya. "Tujuan utama hanya untuk merayakan HUT RI dan silaturahmi. Kalau kemudian dapat juara, itu bonusnya," tuturnya. Dalam pertandingan final, timnya berhasil mengalahkan tim BBPJN dengan skor 13-6. (rls)





Suasana kegiatan peluncuran Kampung Bebas Narkoba di Gunung Bugis, Baru Ulu, Balikpapan Barat.

Ciptakan Zero Narkoba, Kapolresta Balikpapan Luncurkan Kampung Bebas Narkoba di Gunung Bugis

BALIKPAPAN - Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto meluncurkan Kampung Bebas Narkoba di kawasan Gunung Bugis tepatnya di RT 35, RT 36, RT 37, RT 40, RT 05, RT 38, dan RT 10 Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Minggu (20/8/2023).

Dalam kegiatan ini turut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan, dan stakeholder terkait dalam rangka membebaskan masyarakat dari bahaya narkoba.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto mengatakan, dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023 ini Polresta Balikpapan telah mengungkap 203 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 242 orang. Dan sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah Balikpapan Barat, khususnya di daerah Gunung Bugis.

“Untuk itu, pada hari ini kita coba luncurkan kegiatan Kampung Bebas Narkoba di wilayah Gunung Bugis ini dengan harapan ke depan kita bisa zero-kan peredaran narkoba di wilayah ini,” ujarnya.

Pada giat peresmian tersebut, juga dilakukan deklarasi oleh seluruh masyarakat Kelurahan Baru Ulu untuk turut serta membersihkan wilayahnya dari narkoba.

Masyarakat yang melihat ada kegiatan yang mencurigakan terkait narkoba dapat melaporkan ke hotline di nomor Kapolresta Balikpapan 085820009110, Kapolsek Balikpapan Barat 081347629868, atau Kasatresnarkoba Polresta Balikpapan 081348907520.

Kapolresta Balikpapan berharap

dengan adanya kampung bebas narkoba di Kelurahan Baru Ulu ini, dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kota Balikpapan untuk turut serta memerangi narkoba.

“Kita ingin Balikpapan menjadi kota yang bersih dari narkoba. Dengan adanya kampung bebas narkoba ini, kita berharap dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk turut serta memerangi narkoba,” jelasnya.

Setelah peluncuran Kampung Bebas Narkoba, kegiatan kemudian ditutup dengan jalan sehat yang melibatkan masyarakat setempat. “Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, diharapkan wilayah Gunung Bugis dapat menjadi kampung bebas narkoba,” tutup Anton. (bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Senpai Shorijin Kempo saat mempragakan seni bela diri asal Jepang di salah satu mal di Kota Balikpapan, Minggu (20/8).

Balikpapan Shorinji Kempo Festival 2023, Tarik Minat Atlet Baru untuk DBON

BALIKPAPAN-Puluhan praktisi dan atlet Shorinji Kempo memadati salah satu mal di Kota Balikpapan, pada Minggu (2/8/2023) siang. Mereka berkumpul untuk kembali menggelorakan olahraga kempo ini kepada masyarakat Kota Beriman.

Ketua Pelaksana Balikpapan Shorinji Kempo Festival 2023, Reni Octavia mengatakan, tujuan diadakannya giat ini adalah untuk sosialisasi tentang bela diri kempo.

"Yang kedua kami juga mencari bibit atlet sesuai dengan sosialisasi Kemenpora sebelumnya bahwa dari Kemenpora ada DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) dimana mereka mencari bibit atlet sampai kedaerah daerah," ujarnya.

Lebih lanjut Reni Octavia menjelaskan, Shorinji Kempo sempat familiar di Kota Balikpapan. Namun, seiringnya waktu ketenaran nama

olahraga ini mulai surut. Dan kini pihaknya ingin kembali dikenal oleh masyarakat luas.

"Dan kita juga kan bertepatan dengan 17 Agustus, jadi kita menyemarakkan 17-an kali ini dengan Balikpapan Shorinji Kempo Festival 2023 ini," jelasnya.

Dalam Balikpapan Shorinji Kempo Festival 2023 ini sejumlah peragaan di contohkan oleh pelatih atau senpai hingga murid-murid yang berusia anak-anak dan remaja. Bahkan dalam demo-nya juga di peragakan seni bela diri seorang wanita yang di ganggu oleh seorang preman. Dan berbekal bela diri ini sang wanita tersebut aman dari gangguan sang preman.

"Alhamdulillah, animo masyarakat cukup bagus ya. Karena sebelumnya, sebelum marak olahraga beladiri yang lain, itu Shorijin Kempo

termasuk bela diri tertua di Balikpapan dan menjadi olahraga wajib orang-orang Pertamina di jaman dulu," tambahnya.

Dalam bela diri Shorijin Kempo bukan hanya mengajarkan beladiri saja, tetapi juga di ajarkan adab, kasih sayang dan tanggungjawab. "Jadi bukan cuma bela diri aja gitu kan, tapi juga mengajarkan manner maksudnya adab gitu ya. Dari semboyannya kan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kelemahan, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kezaliman," ujar Reni lagi.

Bagi masyarakat yang ingin bergabung pada seni bela diri Shorijin Kempo ini harus berusia minimal 7 tahun dan maksimal tidak terbatas, sehat jasmani dan rohani. **(Bom)**

Penulis: Aprianto



Simulasi penanggulangan keadaan darurat (PKD) di Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan.

Bandara Pendukung IKN, Bandara SAMS Sepinggang Akan Latiham PKD Skala Besar

BALIKPAPAN – PT Angkasa Pura I cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang Balikpapan akan menggelar Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke-111 pada tanggal 24 Agustus 2023 mendatang.

Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ini nantinya akan terbagi menjadi 3 latihan yaitu Aircraft Accident Exercise, Security Exercise dan Fire Building Exercise dihari yang sama. General Manager Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, bahwa Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandara SAMS Sepinggang akan dilaksanakan dalam skala besar dan melibatkan banyak instansi terkait salah satunya kegiatan Aircraft Accident Exercise.

“Saat latihan tersebut akan ada pemberitahuan kepada pengguna jasa, bahwa ada latihan berlangsung. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan khawatir dan panik dengan adanya latihan ini,” ujarnya, Minggu (20/8/2023).

Lebih lanjut Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan, nantinya juga akan ada latihan penanggulangan demonstrasi dan teroris di mall area kedatangan serta latihan penanggulangan kebakaran di lantai 3 di barat loby keberangkatan.

“Latihan penanggulangan keadaan darurat ini melatih kesiapan Bandara SAMS Sepinggang sebagai Bandara pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam koordinasi, komunikasi dan komando dengan berbagai instansi terkait untuk selalu siap dalam menghadapi kondisi darurat di Bandar Udara, baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas,” jelasnya.

Dalam latihan penanggulangan keadaan darurat kali ini melibatkan sedikitnya 650 personil gabungan dari PT Angkasa Pura I, TNI Angkatan Udara Dhombor, Otoritas Bandara Wilayah VII, Basarnas Kota Balikpapan, Brimob Polda Kaltim, Polres Balikpapan, Polsek Kawasan Bandara, Koramil 0905/03 Balikpapan, Perum LPPNPI Cabang Balikpapan, dan Rumah sakit setempat. (Bom)

Penulis: Aprianto





**DANDIM CUP
KEJURPROV
SERI 3
2023**

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN

DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING

KETUA IMI KALTIM



**SAFETY
RIDING**



**LOMBA
DRAG BIKE**



**TALKSHOW
KEREN**



**LOMBA
MODERN DANCE**



**LIVE
MUSIC**



**LOMBA
17 AGUSTUS**



**LOMBA
FASHION SHOW**



**JALAN
SANTAI**



**KULINER
UMKM**

SAFETY RIDING & DRAG BIKE

**26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA**

JALAN SANTAI



**DOOR
PRIZE !!!**

Disney+ hotstar
NETFLIX



PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571



Ardiansyah: Bazar UMKM di Sangkulirang, Momentum Melaju Angkat Ekonomi Rakyat

SANGKULIRANG - Suasana pembukaan Bazar UMKM Kutim gelaran Diskop UMKM Kutim bekerja sama dengan event organizer GEN Pro Indonesia yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Rajawali Desa Benua Ilir Kecamatan Sangkulirang, Sabtu (19/8/2023) berjalan semarak karena bertepatan dengan momentum masih dalam rangkaian HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Camat Rahmad bersama jajaran Forkopincam, kepala OPD terkait dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Perwakilan GEN Pro Teharudin mengatakan Bazar UMKM Kutim sudah masuk di titik kesebelas yaitu di Kecamatan Sangkulirang.

"Kemarin kita baru saja menutup,

gelaran Bazar UMKM di Kecamatan Kaliorang. Alhamdulillah jalannya acara bazar tetap lancar dan perputaran uang lewat belanja warga tetap optimal. Kita terus fokuskan meningkatkan perputaran ekonomi kerakyatan dalam menekan inflasi di daerah," tegasnya.

Selanjutnya, ada hal yang menarik dari peserta Bazar UMKM di Sangkulirang ini yakni ada Bumdes mengelola produk UMKM yakni nanti dibawa untuk dipasarkan lebih luas.

"Adalah produk juruh semacam turunan gula merah. Ini asli Sangkulirang, dan baru saja kita kurasi layak dipasarkan keluar daerah. Dalam hal ini, GEN pro siap mengenalkan produk lokal menggema dan dikenal khalayak lebih massif," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan nantinya di penutupan Bazar UMKM di

Sangkulirang akan dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor yang memasuki purna tugas. Beliau juga akan meresmikan PT Kobexindo Cement di Kaliorang. Ia pun menegaskan kegiatan bazar ini bukan tanpa alasan.

"Kegiatan ini menumbuhkan ekonomi kerakyatan sebagai tolok ukur hadirnya UMKM di kecamatan terjadi transaksi penjual dan pembeli. Inshaallah ini salah satu barometer kendalikan inflasi," bebernya.

Selanjutnya, ia berharap uang yang dimiliki orang kaya mengendap di bank tapi harus dibelanjakan untuk memberi perhatian dan membangkitkan ekonomi kerakyatan.

"Ini keharusan ataupun keniscayaan untuk menggairahkan geliat perekonomian kecamatan agar terus melaju sesuai dengan tema HUT ke-78 RI pada tahun ini," jelasnya. (Rkt)

Pendapatan Paser 2024 Masih Bergantung Sektor Tambang

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan itu diprediksi terjadi berdasarkan pendapatan yang nantinya diterima oleh daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Paser, Fahmi Fadli, pasca penandatanganan nota kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser atas rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Paser 2024.

"Anggaran Pemerintah Kabupaten Paser untuk tahun 2024 meningkat, tidak mengalami penurunan," tegas Fahmi.

Adapun pendapatan yang nantinya diterima itu, di antaranya bersumber dari kucuran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Selain itu adapula dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendati begitu, Fahmi mengakui, pendapatan yang meningkat tersebut masih didominasi dari sektor pertambangan. Namun, ia juga mengklaim terus mengupayakan agar menerima pendapatan dari sektor lainnya.

"Peningkatan masih didominasi oleh sektor pertambangan batu bara, sementara ini juga masih menggali potensi di sektor lainnya," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Paser dalam setiap tahun mengandalkan sektor pertambangan khususnya batu bara sebagai pendapatan yang diterima berkisar 70 persen. Hal ini berpotensi memperlancar pembangunan daerah yang terbilang masih perlu penanganan serius.

Padahal setiap tahun pula Pemkab Paser menggaungkan fokus pada pembangunan industri pengolahan berbasis pertanian untuk mening-

katkan perekonomian masyarakat guna melepas ketergantungan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor pertambangan.

"Sektor pertambangan tidak bisa diandalkan secara terus menerus karena ketersediannya yang terbatas," ucap Bupati Paser, Fahmi Fadli saat menyampaikan pidato Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Pendopo Bupati Paser, Kamis (31/3/2022) lalu.

Pengalihan dari sektor pertambangan ke industri pengolahan pertanian diakuinya terdapat berbagai persoalan di antaranya pengembangan kewirausahaan yang rendah serta pangsa pasar yang belum terbentuk. (bs)

Penulis: Bhakti Sihombing
Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BERSYOKI

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE
PALING HEMAT
GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Penggeledahan oleh Petugas di blok hunian WBP.

Petugas Geledah Hunian WBP Hingga Tes Urine

PASER - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Paser bersama tim gabungan dari Kodim 0904/PSR dan Polres Paser secara tiba-tiba melangsungkan penggeledahan di hunian Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2 B Tanah Grogot.

Penggeledahan itu dilangsungkan pada Jumat (18/8/2023). Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sebuah kabel, paku, kaca, tali, pinset, jarum, amplas, dan gelas logam yang terkategori sebagai barang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kegiatan penggeledahan kamar hunian warga binaan merupakan bentuk deteksi dini memastikan Rutan selalu dalam keadaan aman,"

kata Kepala Rutan (Karutan) Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad, saat dihubungi, Minggu (20/8/2023).

Selain menggeledah barang-barang yang dilarang bagi WBP, petugas juga melakukan tes urine bagi WBP secara acak. Dari hasil tes urine tersebut, petugas tidak menemukan danya WBP yang terdeteksi mengkonsumsi narkoba.

"Ini merupakan Instruksi langsung dari Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)," sambungnya.

Kepada petugas dan aparat, Bayu berpesan agar melakukan kegiatan dengan penuh Integritas, bertang-

gung jawab dan tidak sekadar menggururkan kewajiban. "Tidak kalah pentingnya harus bersikap humanis dalam melaksanakan razia kepada warga binaan," pintanya.

Ketua BNK Paser, sekaligus Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf menyatakan, dalam mewujudkan P4GN, dibutuhkan keseriusan ekstra dari semua pihak. Dengan begitu pula diharapkan dapat menciptakan Kabupaten Paser yang bersih dari narkoba.

"Saya terus berupaya agar vertikalisasi BNK menjadi BNNK, jadi kami langsung melakukan penindakan, karena selama ini BNK Paser hanya bisa melakukan penyuluhan dan pendampingan," tutur Masitah. (bs)



Kebakaran Pertamina di Desa Tanah Periuk beberapa waktu lalu.

DPRD Usul Kaji Aturan Usaha BBM Eceran Sistem Digital di Paser

PASER - Penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan sistem digital bertajuk Pertamina yang kian menjamur di Kabupaten Paser, utamanya Kecamatan Tanah Grogot, kini jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Pasalnya, belum lama ini kegiatan usaha migas milik masyarakat di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, mengalami kebakaran. Insiden itu menghancurkan kios milik salah seorang pedagang, bahkan berdampak ke sebagian rumah sekitar, pada Kamis (17/8/2023) lalu.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser, Hendrawan Putra menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser perlu menerapkan aturan mengenai distribusi BBM termasuk Elpiji yang kini masih belum ditegaskan.

"Hingga saat ini Kabupaten Paser belum menerapkan aturan mengenai pendistribusian BBM sehing-

ga keberadaan Pertamina semakin menjamur," kata Hendrawan saat dihubungi, Minggu (20/8/2023).

Politisi Partai Demokrat itu menilai, pengaturan usaha migas perlu diterapkan sebagai bagian dari meminimalisir insiden serupa kedepannya. Setidaknya, para pelaku usaha memahami tentang keamanan termasuk pemahaman.

"Supaya bisa diminimalisir peristiwa serupa, dari aturan ini nanti juga bisa memberikan pemahaman bagi pelaku usaha agar bisa lebih mengutamakan keselamatan pada usaha yang dijalankan," ungkapnya.

Hendrawan pun turut memastikan, bahwa usaha BBM eceran dengan sistem digital itu tidak memiliki izin. Resiko terjadinya musibah juga dinilai lebih berpotensi tinggi dibanding eceran yang hanya menggunakan botol saja.

"Sekarang sudah semakin banyak.

Belum diketahui izin usaha yang mereka gunakan, jika tidak memiliki izin maka keberadaannya juga sama dengan pengecer pada umumnya," sebutnya.

Ia berharap agar produk hukum guna mengatur keberadaan Pertamina di Kabupaten Paser bisa digodok secepatnya. Sembari hal itu berproses, ada pula keinginan agar izin dan legalitas penjualan BBM eceran untuk disikapi lebih dini mengantisipasi timbulnya masalah baru.

Sementara, terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi, pihaknya menginginkan adanya kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Untuk diketahui, kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu itu, mengalami kerugian hingga Rp 200 juta. **(bs)**

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN
TOTAL HADIAH
RATUSAN JUTA RUPIAH**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**

26-27 AGUSTUS 2023
SIRKUIT EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE 201 M (KEJURPROV)

KELAS POINT

1. DB. 1 - BRACKET 8 DETIK
2. DB. 2 - BRACKET 9 DETIK
3. DB. 3 - BRACKET 10 DETIK
4. DB. 4 - SPORT 2 TAK TUNE UP FRAME STD 105 CC (POINT)

KELAS SUPPORTING

5. DB. 5 - BEBEK 4 TAK TUNE UP 100 CC
6. DB. 6 - MATIC BANGKA STD INJEKSI 200 CC
7. DB. 7 - SPORT 4 TAK BANGKA STD NON DOHC 300 CC
8. DB. 8 - MERIC TUNE UP 200 CC
9. DB. 9 - BEBEK 2 TAK 100 CC
10. DB. 10 - MATIC BANGKA STD 100 CC (MPF)
11. DB. 11 - PFA 300 CC
12. DB. 12 - BEBEK 4 TAK 100 CC
13. DB. 13 - BEBEK 4 TAK 200 CC
14. DB. 14 SUNMORI CIVIL EX KING
15. DB. 15 SUNMORI BEBEK 2 TAK 100 CC
16. DB. 16 SUNMORI BEBEK 2 TAK 100 CC NON BUILD IM
17. DB. 17 SUNMORI BEBEK 2 TAK 100 CC
18. DB. 18 SUNMORI SPORT 2 TAK 100 CC
19. DB. 19 SUNMORI MATIC INJEKSI BANGKA STD 100 CC
20. DB. 20 SUNMORI BEBEK 4T BANGKA STD 100 CC
21. DB. 21 SUNMORI SPORT 4T 80 CC

DRAG BIKE 402 M

22. DB. 22 BIC MERIC 250 - 400 CC TOURING
23. DB. 23 SPORT 250 - 400 CC TOURING
24. DB. 24 PFA SPORT
25. DB. 25 HARLEY NON TOURING SADDLE BAG
26. DB. 26 HARLEY TOURING SADDLE BAG

REGISTRASI PESERTA

KELAS UTAMA

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 510 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 560 K

KELAS SUPPORTING

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 410 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 460 K

KELAS SUNMORI

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 360 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 410 K

LINK PENDAFTARAN :

[HTTPS://LINKTR.EE/
DNTIMINGPENDAFTARAN](https://linktr.ee/dntimingpendaftaran)

PRESENT BY :

SUPPORTED BY :

MEDIA PARTNER :

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571

**10
09
2023**

**REUNI
SMK PERTIWI**
Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize

Only
Rp. 50k

Konfirmasi kehadiran : Masnah

081252119669



Wali Kota Andi Harun: Samarinda Siap Raih Adipura Tahun Ini

SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan ambisinya untuk meraih penghargaan Adipura pada tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjadikan Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang bersih dan nyaman.

"Semua instansi harus bekerja sama. Kita akan raih Adipura untuk mewujudkan Kota Samarinda yang nyaman dan bersih," ujar Andi Harun saat ditemui di Samarinda, Sabtu.

Penghargaan Adipura dianggap sebagai indikator kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup. "Samarinda sudah mendapatkan sertifikat Adipura, tentunya kami ingin prestasi itu diting-

katkan dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa raih," tambah Andi Harun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Endang Liansyah, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Samarinda untuk bersama-sama membenahi lingkungan. Beberapa titik yang menjadi fokus penilaian Adipura meliputi pembenahan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perawatan taman, kebersihan jalan kota, sekolah, terminal, hingga pertertiban di kawasan pasar tradisional.

Endang berharap agar sejumlah titik lokasi tersebut terus mendapatkan perhatian dari OPD terkait agar kebersihan dan kerapiannya tetap terjaga. "Program Adipura untuk memacu agar kita terus berupaya meningkatkan kemampuannya da-

lam hal pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan demi mewujudkan Tata kelola Lingkungan yang baik," ujar Endang.

Diketahui, Kota Samarinda masih tertinggal dibandingkan beberapa wilayah lain di Kaltim dalam meraih penghargaan Adipura. Pada tahun 2022, dua kota di Kaltim, yaitu Balikpapan dan Bontang, berhasil meraih Adipura Kencana. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser juga meraih anugerah Adipura pada tahun yang sama. Namun, pada tahun tersebut, Kota Samarinda hanya berhasil meraih sertifikat Adipura. **(ant/MK)**

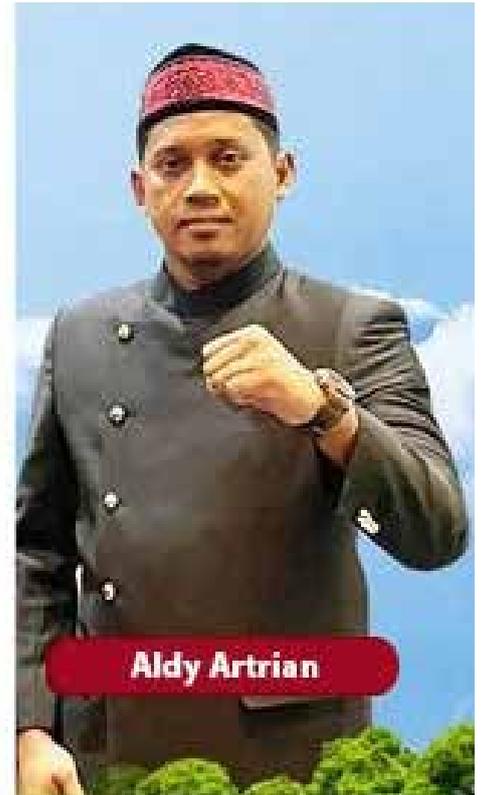
Editor: Agus Susanto



Moh Khazin



Teguh Wibowo



Aldy Artrian

Pascapelantikan, Bawaslu Kukar, PPU, dan Bontang Telah Tetapkan Ketua, Inilah Sosoknya

SAMARINDA - Menyusul pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, tiga kabupaten di Kaltim telah menyelesaikan pemilihan ketua mereka.

Dalam acara pelantikan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (19/08/2023), 38 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Kaltim turut dilantik. Setelah pelantikan, rapat pleno diadakan untuk menentukan komposisi ketua dan koordinator divisi di setiap kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Bawaslu Kukar, Bawaslu Penajam

Paser Utara (PPU), dan Bawaslu Bontang telah menyelesaikan pemilihan ketua mereka. Teguh Wibowo terpilih sebagai ketua Bawaslu Kukar. "Tinggal dituangkan secara administrasi saja," kata Teguh.

Selanjutnya, Moh Khazin terpilih sebagai ketua Bawaslu PPU. "Alhamdulillah, plenonya tidak terlalu alot dan semua disepakati secara musyawarah," ujar Khazin.

Sementara itu, Aldy Artrian, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bawaslu periode 2018-2023, kembali terpilih sebagai ketua Bawaslu Bontang. Aldy mengungkapkan bahwa pemilihan ketua untuk Bawaslu

Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim masih berlangsung. "Setahu saya, pleno di beberapa kabupaten/kota masih berlangsung," tuturnya.

1.912 ANGGOTA BAWASLU DILANTIK

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, melantik dan mengambil sumpah serta janji dari 1.912 Anggota Bawaslu dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2023-2028.

Dalam kesempatan tersebut, Bagja menekankan pentingnya para anggota yang baru dilantik untuk melanjutkan kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota periode sebelumnya da-

BAWASLU KOTA BONTANG

KETUA:

Aldy Artrian, S.Sos., MPA

Kordiv SDMO

Wakordiv PPPS

Korwil Bontang Utara

Ismail Usman, S.AB

Kordiv PPPS

Wakordiv HPPH

Korwil Bontang Selatan

Syahriah, S.Pdi

Kordiv HPPH

Wakordiv SDMO

Korwil Bontang Barat

lam menjaga integritas demokrasi melalui pengawasan pemilu.

"Semoga yang terlantik dapat menjaga dan melanjutkan proses demokrasi yang telah dijalankan periode sebelumnya," ujar Bagja saat pelantikan di Jakarta.

Mengingat Pemilu 2024 yang akan memiliki karakteristik berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, Bagja menekankan pentingnya soliditas dan komunikasi antara anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan penyelenggara pemilu lainnya.

"Kami berharap agar dasar musy-

awarah mufakat menjadi prioritas, bukan sekadar pendapat atau voting," tegas alumnus Universitas Indonesia tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan, Bagja juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

"Kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendampingi Bawaslu 2018-2023. Semoga Tuhan memberikan pahala atas dedikasi bapak ibu dalam menjaga dan men-

gawal pemilu serta demokrasi di Indonesia," ungkap Bagja.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 turut disaksikan oleh tiga Anggota Bawaslu: Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Hadir pula Ketua dan Anggota KPU: Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, serta Sekjen Bawaslu, Ichsan Fuady. (MK)

Editor: Agus Susanto




Susunan Penanggung Jawab Divisi

BAWASLU

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Periode 2023 - 2028



Moh Khazin, S.H
KETUA
Koordinator Divisi SDMO, Diklat, Datin



Wakil Koordinator Divisi
Rusmansyah, S.H.I., M.H



Edwin Irawan, S.H
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,
PARMAS & HUMAS



Wakil Koordinator Divisi
Moh. Khazin, S.H.



Rusmansyah, S.H.I., M.H
Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa



Wakil Koordinator Divisi
Edwin Irawan, S.H

 Bawaslu Kab. PPU
  Bawaslu_ppu
  Bawasluppu
  Bawasluppu_
  ppu.bawaslu.go.id
  Bawaslu ppu

Saipul: Ketua Bawaslu Harus Klir dari Masalah untuk Hadapi Tantangan Pemilu 2024

SAMARINDA - Mantan Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul, menekankan pentingnya memiliki sosok ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang profesional dan bebas dari masalah pribadi menjelang Pemilu 2024.

Sebab kata dia, tantangan Pemilu 2024 sangat besar, sehingga diperlukan ketua yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya.

"Proses seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Oleh karena itu, sosok ketua yang dipilih harus memiliki nilai lebih dan mengerti sepenuhnya tentang kepemiluan," ungkap Saipul.

Penegasan Saipul ini muncul menyusul sejumlah nama ketua yang telah disepakati dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota pasca pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Sabtu (19/10/2023).

Dia menjelaskan, ada dua opsi dalam pemilihan ketua, yaitu dari sosok incumbent atau dari sosok anggota Bawaslu yang belum pernah berada di Bawaslu tetapi memiliki pengalaman di lembaga pemilu lainnya. "Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing," tuturnya.

Jika sosok yang terpilih sebagai ketua adalah incumbent atau anggota lama, diharapkan mereka tidak memiliki masalah pribadi atau masalah etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemilihan ketua. Tak tertutup kemungkinan, bila pernah ada sanksi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red.), hal tersebut akan berdampak besar pada lembaga," ujarnya.

Prinsipnya, menurut Saipul, sosok ketua harus bebas dari masalah. Jika pendatang baru, misalnya dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), berarti mereka sudah klir dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu.

"Sosok yang relevan dan bebas dari masalah, baik yang baru maupun yang sudah pernah di Bawaslu, adalah kunci agar tidak diserang oleh pihak lain," tegasnya.

Selain itu, dosen Fisipol Universitas Mulawarman ini juga menekankan pentingnya ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memahami karakteristik dan budaya setempat. "Hal ini penting agar dapat bersinergi dengan masyarakat di daerah tersebut," pungkasnya. (MK)

Editor: Agus Susanto.



Saipul Soroti KPU Kaltim Terkait Panduan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota Legislatif

SAMARINDA - Saipul, Mantan Ketua Bawaslu Kaltim, menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dan Kabupaten Kota se-Kaltim terkait pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif. Ia menilai, KPU seharusnya menyediakan panduan khusus yang memuat pointer-pointer bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atas rekam jejak calon legislatif yang terdaftar dalam DCS.

"KPU perlu memberikan panduan khusus kepada masyarakat terkait

hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memberikan tanggapan, apakah berkaitan dengan rekam jejak positif atau negatif dari calon legislatif, atau hal-hal teknis lain seperti domisili," ungkap Saipul.

Lebih lanjut, Saipul menekankan pentingnya KPU dalam memberikan jaminan kerahasiaan bagi masyarakat yang memberikan masukan atau tanggapan.

"Masyarakat harus merasa aman dan terlindungi ketika memberikan masukan. Jaminan kerahasiaan ini

sangat penting," tegasnya.

Di sisi lain, Saipul juga mengingatkan Bawaslu untuk lebih proaktif dalam mencermati DCS yang telah diumumkan oleh KPU. "Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu harus aktif dalam mencermati DCS. Jangan sampai masyarakat yang lebih aktif dalam memberikan tanggapan, sementara Bawaslu kurang responsif," pungkasnya. (MK)

Editor: Agus Susanto



Anggota Komisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim Mukhasan Ajib.

KPUD Kaltim: Anggota DPRD Pindah Partai Diberhentikan Antar Waktu

SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah pindah partai politik akan diberlakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini dijelaskan Anggota Komisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim Mukhasan Ajib, kepada Media Kaltim.com beberapa hari yang lalu.

"Banyak dari anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kaltim ini mengajukan menjadi Bacaleg 2024 dari partai baru, bukan dari partai sebelumnya waktu naik jadi dewan tahun 2019 kemarin, maka dengan aturan ini mereka bisa diberhentikan, atau di PAW," ujarnya.

Persoalan ini berawal ketika ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tang-

gal 16 Juni 2023 yang merupakan aturan turunan dari Pasal 193 Ayat (2) Huruf i UU Pemda, dalam isi peraturan tersebut menyebutkan jika Anggota DPRD yang sudah pindah partai dan maju sebagai Bacaleg partai lain maka harus di-PAW.

"Jadi setelah Bacaleg itu ditetapkan atau DCP ditetapkan kemungkinan pada 3 November nanti, maka besoknya tanggal 4 November secara sertamerta bukan anggota dewan lagi," ungkapnya.

Sementara itu sudah ada beberapa anggota DPRD yang telah di PAW di beberapa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Nah di beberapa DPRD kan sudah banyak yang melakukan PAW dan ada pula yang masih banyak yang

diproses," ungkapnya.

Surat edaran Mendagri itu dianggap menimbulkan kerugian konstitusional terhadap anggota DPRD yang pindah partai. Karena, tidak dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai anggota legislatif hingga 2024 atau sesuai periode masa jabatan mereka.

"Karena mungkin mereka melihat di partai baru punya banyak kesempatan jadi mereka pindah, itu hak mereka, dan mereka yang diajukan partai sebagai caleg tetap kita terima karena syaratnya terpenuhi yakni mengundurkan diri dari partai sebelumnya," ujarnya. **(han)**

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

**Kode Promo
BTSOLI**

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

*Syarat dan ketentuan berlaku

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



toko.radarmedia.id

MK.CO



MEDIA KALTIM GROUP



Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja

Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Kampus: Bawaslu RI Desak KPU Revisi Aturan

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk merevisi aturan kampanye. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, termasuk sekolah dan kampus.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa aturan kampanye yang perlu direvisi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

"Lebih bagus PKPU-nya yang direvisi supaya jelas di mana boleh, tidak boleh, dan metode apa yang boleh atau tidak," ucap Bagja saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jakarta.

Bagja menambahkan, KPU perlu mengatur dengan detail mengenai fasilitas pemerintah dan pendidikan yang dapat digunakan untuk kampanye. Ia memberikan contoh, seperti apakah Istana Negara dan balai kota termasuk dalam fasilitas pemerintah yang boleh digunakan untuk kampanye.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan wali kota yang berkampanye di balai kota meskipun tanpa menggunakan atribut kampanye. Selain itu, Bagja menekankan pentingnya KPU mengatur apakah kampanye di fasilitas pendidikan, seperti TK, SD, dan SMP, diperbolehkan mengingat siswa di tingkat tersebut belum memasuki usia pemilih.

Lebih lanjut, Bagja menyoroti

pentingnya KPU mengatur metode kampanye yang diperbolehkan di fasilitas-fasilitas tersebut. Sebagai contoh, apakah partai politik diperbolehkan mengadakan rapat umum di kampus. "Kalau rapat umum, terbayang di kampus ada rapat umum partai, apalagi kampus negeri. Boleh atau tidak? Makanya kami harus bicara masalah teknis detail," tuturnya.

Sebagai informasi, pada Selasa, 15 Agustus, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan asalkan tanpa menggunakan atribut kampanye. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. (ant/MK)

Editor: Agus Susanto



Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana

Waspadai Black Campaign, Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Berhati-hati Tangani Aduan Korupsi

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajaran jaksa, khususnya yang bertugas di bidang intelijen dan tindak pidana khusus, untuk berhati-hati dalam menerima dan menangani aduan korupsi menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024.

Instruksi ini diberikan untuk mengantisipasi adanya black campaign yang mungkin ditujukan kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, menyampaikan isi instruksi tersebut di Jakarta, Minggu. "Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil pres-

iden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati," ujarnya.

Instruksi ini juga menggarisbawahi pentingnya mengantisipasi adanya indikasi black campaign yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip dan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk menunda pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap para calon yang telah resmi ditetapkan, sampai seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan selesai.

Ketut Sumedana menambahkan, "Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik

praktis oleh pihak-pihak tertentu."

Jaksa Agung dalam siaran resminya menjelaskan bahwa memasuki tahun politik, institusi Kejaksaan berpotensi menjadi alat untuk menyerang calon-calon tertentu. Oleh karena itu, dia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mencegah adanya kampanye hitam (black campaign) terselubung.

"Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum," tegas Jaksa Agung. (ant/MK)

Editor: Agus Susanto



FOTO: ISTIMEWA

Komisioner KPU RI Idham Holik saat melakukan konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta.

KPU Siap Revisi Aturan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan Pasca Putusan MK

JAKARTA-Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana untuk merevisi regulasi terkait kampanye Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI, Idham Holik, menyatakan KPU akan menyesuaikan peraturan teknis terkait hal tersebut. "Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, KPU akan melakukan perbaikan peraturan," tegas Idham kepada wartawan.

Revisi yang dimaksud adalah pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam peraturan tersebut, ada pasal yang melarang kampanye di fasilitas

pemerintah dan pendidikan.

Idham menambahkan bahwa revisi akan memperjelas teknis kampanye di kedua fasilitas tersebut. KPU juga akan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam proses revisi dan meminta masukan dari publik. Setelah draf revisi selesai, KPU akan mengonsultasikannya dengan DPR dan Pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI menekankan pentingnya batasan jelas terkait fasilitas mana saja yang boleh digunakan untuk kampanye. "Kita harus bicara ketentuan teknis detailnya," kata Bagja, Ketua Bawaslu RI.

Diketahui, MK memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan asalkan tanpa meng-

gunakan atribut kampanye. Putusan ini berasal dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni terkait inkonsistensi norma dalam UU Pemilu.

MK memutuskan untuk memasukkan bagian Penjelasan pasal tersebut ke dalam norma pokok, dengan pengecualian pada frasa "tempat ibadah". Sehingga, kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan diperbolehkan asalkan mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan dilakukan tanpa atribut kampanye. **(MK)**

Editor: Agus Susanto



RAMAIKAN & IKUTI EVENT NYA YUK

ACARA PUNCAK HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

DAFTAR PAKAI KUPON DIGITAL GRATIS

IKUTI JUGA SENAM AEROBIK MASSAL (XEROBIC QUEEN76)

JALAN SEHAT

LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

DAFTAR JALAN SEHAT GRATIS DISINI

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>

INFORMASI 0853 4894 3982 (Adhi)

